



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggall Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 17 Januari 2023/Periodik - 2022)

BIDANG : BUMN/BUMD
LEMBAGA : PT PERUSAHAAN LISTRIK NEGARA (PERSERO)
UNIT KERJA : UIP SUMBAGUT

I. DATA PRIBADI

1. Nama : OCTAVIANUS DUHA
2. Jabatan : GENERAL MANAGER
3. NHK : 466755

II. DATA HARTA**A. TANAH DAN BANGUNAN**

Rp. 1.200.000.000

1. Tanah dan Bangunan Seluas 169 m2/120 m2 di KAB / KOTA KOTA BUKITTINGGI , HASIL SENDIRI Rp. 850.000.000
2. Tanah dan Bangunan Seluas 6 m2/30 m2 di KAB / KOTA KOTA JAKARTA SELATAN , HASIL SENDIRI Rp. 350.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN

Rp. 1.539.500.000

1. MOTOR, HONDA PCX 150 Tahun 2018, HASIL SENDIRI Rp. 17.000.000
2. MOBIL, HONDA CITY Tahun 2021, HASIL SENDIRI Rp. 289.500.000
3. MOBIL, HYUNDAI SANTA FE Tahun 2022, HASIL SENDIRI Rp. 715.000.000
4. MOTOR, HONDA ADV 160 Tahun 2022, HASIL SENDIRI Rp. 38.000.000
5. MOBIL, TOYOTA FORTUNER Tahun 2019, HASIL SENDIRI Rp. 480.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA

Rp. 73.000.000

D. SURAT BERHARGA

Rp. ----

E. KAS DAN SETARA KAS

Rp. 452.287.165

F. HARTA LAINNYA

Rp. ----

Sub Total

Rp. 3.264.787.165

III. HUTANG

Rp. 855.167.146

IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)

Rp. 2.409.620.019



1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.